

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarmasin Terima Rancangan KUA PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/378810/dprd-banjarmasin-terima-rancangan-kua-ppas-apbd-tahun-2024>

DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menerima pengajuan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2024 pada rapat paripurna dewan di gedung dewan kota. Rapat paripurna tingkat 1 tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Banjarmasin H Harry Wijaya didampingi unsur pimpinan lainnya, Matnor Ali dan Tugiatno, dari Pemkot Banjarmasin dihadiri Sekdakot Banjarmasin Ikhsan Budiman. Ketua DPRD Kota Banjarmasin H Harry Wijaya menyampaikan bahwa seluruh fraksi di DPRD Kota Banjarmasin menyetujui rancangan KUA PPAS APBD tahun 2024 yang diajukan Pemkot Banjarmasin ini.

Sehingga, ungkap dia, pembahasan akan dilanjutkan ke tingkat selanjutnya oleh badan anggaran dewan. Intinya kita akan sangat teliti pada pembahasan ini, sehingga APBD 2024 nantinya betul-betul mensejahterakan masyarakat, meningkatkan pembangunan. Sementara itu, Sekdakot Banjarmasin Ikhsan Budiman menyampaikan, bahwa rancangan KUA PPAS APBD tahun 2024 untuk pendapatan sekitar Rp2 triliun lebih.

Pemkot Banjarmasin merancang khusus untuk pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2024 sekitar Rp811 miliar dan untuk dana pembagian dari transfer pusat sekitar Rp1,1 triliun. Diproyeksi pendapatan daerah ini berkurang sekitar Rp322 miliar dari tahun 2023. Dijelaskan dia berkurang pendapatan daerah ini karena belum dicantumkannya

pendapatan dari bantuan alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat. Kalau sudah masuk nantinya DAK dan DAU ini bisa naik signifikan dari tahun sebelumnya.

Dengan pendapatan daerah yang sudah dirancang pasti itu, kata dia, maka belanja daerah juga menyesuaikan, yakni, KUA PPAS APBD tahun 2024 sekitar Rp2,092 triliun. Dia pun menyampaikan apresiasi kepada pihak legislatif yang sudah menerima rancangan KUA PPAS APBD tahun 2024 ini. Pemkot Banjarmasin memastikan komitmen untuk bersama legislatif untuk merancang program-program pembangunan tahun 2024.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/378810/dprd-banjarmasin-terima-rancangan-kua-ppas-apbd-tahun-2024>, 20 Juli 2023.
2. <https://www.beritaja.com/dprd-banjarmasin-terima-rancangan-kua-ppas-apbd-tahun-2024-beritaja-56952.html>, 20 Juli 2023.

Catatan Berita:

Pengaturan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

- 1) Pasal 31 ayat (1); Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Penjelasan dari Pasal ini menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- 2) Pasal 31 ayat (2); Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
Dilanjutkan dalam penjelasan Pasal tersebut bahwa Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah.
- 3) Pasal 32 ayat (1); Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- 4) Pasal 32 ayat (2); Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Disampaikan lebih lanjut dalam bagian penjelasan apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta, Badan Pemeriksa Keuangan dianggap menyetujui sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah.